**BAB II**

**KAJIAN TEORI**

1. **Hakikat Partisipasi Masyarakat** **Sebagai *Supporting Agency***
2. **Pengertian Partisipasi**

Pengertian partisipasi dapat kita ambil dari Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang diartikan sebagai “bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seorang di suatu peristiwa”[[1]](#footnote-1). Jadi setiap orang dapat dikatakan berpartisipasi apabila terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Partisipasi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.

Partisipasi juga meliputi norma eksistensi seseorang dalam organisasi dan tindakan individu dalam struktur organisasi. Soerjono Soekanto merumuskan tiga pengertian partisipasi dalam perspektif sosiologis yang pada hakikatnya pengertian-pengertian tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Partisipasi dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat[[2]](#footnote-2).

Dalam perspektif pendidikan, Sardiman memberikan pengertian bahwa “partisipasi adalah segala tindakan yang berproses dan dimulai dari status seseorang dalam kelompok organisasi dan struktur sosial sebagai upaya pembinaan diri dan orang lain”[[3]](#footnote-3).

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan sisi hubungan antara posisi individu dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu tindakan, apalagi bila tindakan itu dilakukan atas nama jabatan yang dipangku dalam suatu organisasi, maka norma-norma dan peraturan itu akan membimbingnya dalam bertindak.

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian partisipasi yaitu partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

1. **Pengertian Masyarakat**

Definisi Masyarakat dapat kita ambil dari Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang diartikan “dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi)”[[4]](#footnote-4). Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa:

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga[[5]](#footnote-5).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac lver dan Page (dalam Soerjono Soekanto), memaparkan bahwa “masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia”[[6]](#footnote-6). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Menurut Ralph Linton (dalam Sardiman) masyarakat merupakan “setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”[[7]](#footnote-7) sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto) adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan”[[8]](#footnote-8).

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya[[9]](#footnote-9). Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama[[10]](#footnote-10).

Menurut Emile Durkheim (dalam Djuretnaa Imam Muhni) “keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan social. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat”[[11]](#footnote-11). Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society.* Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

1. **Partisipasi Masyarakat Dalam Wadah Komite Sekolah**

Komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional memang sudah cukup jelas, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 pasal 8 dan 9. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Mentri Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002. Dalam Keputusan MENDIKNAS tersebut dinyatakan bahwa:

Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan: (1*) advisory agency* (pemberi pertimbangan) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2*) supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan dan (4) *mediator,* penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah[[12]](#footnote-12).

Supaya tidak tumpang tindih, kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing lembaga, perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi dan kapan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak kontribusi komite sekolah terhadap sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan cukup banyak. Namun telah dijelaskan sebelumnya bawha penelitian ini hanya meneliti tentang partisipasi masyarakat sebagai  *Supporting Agency* (Lembaga Pendukung).

1. **Partisipasi Masyarakat Sebagai *Supporting Agency* (Lembaga Pendukung) Dalam Pendidikan**

Masyarakat sebagai pendukung (*supporting*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Bentuk kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat sebagai pendukung (*supporting*) dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. mengadakan pertemuan secara berkala dengan *stakeholder* dilingkungan sekolah;
2. mendorong peran serta masyarakat dan dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu;
3. memotivasi masyarakat yang kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran disekolah;
4. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan seperti mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu dan ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah[[13]](#footnote-13).

Berdasarkan uraian di atas mengandung maksud bahwa masyarakat berfungsi memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan di dalam sekolah tidak dibiarkan terus terjadi. Masyarakat juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Sarana dan prasarana juga harus mendapat perhatian penting, karena masyarakat berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah melalui sumber daya yang ada di masyarakat.

Dedi Supriadi mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai *Supporting Agency* dalam prakteknya dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraaan pendidikan yaitu:

1. Mendorong orang tua siswa untuk ikut memikirkan dan berpartisipasi dalam penyelengaraan pendidikan.
2. Menggalang dana dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dengan menyampaikan terlebih dahulu program sekolah.
3. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi siswa dan guru merupakan bentuk dukungan yang sangat perlu dikembangkan[[14]](#footnote-14).

Nanang Fattah juga memberikan pendapatnya tentang partisipasi masyarakat sebagai *Supporting Agency* yang mengatakan bahwa:

Ukuran partsipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat menanggung biaya sekolah baik yang masuk katagori bantuan pembangunan maupun iuran bulanan peserta didik. Partisipasi yang berlaku universal adalah kerjasama yang erat antara perencana di sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan kualitas sekolah. Kedudukan masyarakat dalam manajemen sekolah sangat penting untuk membantu memajukan kualitas sekolah[[15]](#footnote-15).

Partisipasi masyarakat sebagai pemberi dukungan terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila sekolah mengadakan kegiatan yang menelan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Kegiatan dukungan dalam masalah pendanaan biasanya ditempuh secara prosedural dan berhati-hati. Demi kepentingan program sekolah, masyarakat berupaya mengakomodir permintaan tambahan anggaran untuk kegiatan yang hanya bersifat unggulan.

Berdasarkan penjelasan para pakar di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat banyak memiliki peran dan pengaruhnya terhadap keberhasilan lembaga pendidikan. Untuk itu apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, secara otomatis peningkatan lembaga pendidikan tersebut akan terhambat.

1. **Indikator Partisipasi Masyarakat Sebagai *Supporting Agency***

**Dasim Budimansyah mengatakan bahwa indikator** Partisipasi Masyarakat Sebagai *Supporting Agency* (lembaga pendukung) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya
2. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah.
3. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.
4. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
6. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
7. Mobilisasi bantuan sarana dan parasarana  sekolah.
8. Mengkoordinasi dukungan sarana dan parasarana  sekolah
9. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah.
10. Pengelolaan Anggaran
11. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah.
12. Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.
13. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.
14. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah[[16]](#footnote-16).

Umaedi juga mengatakan bahwa secara fungsional **indikator** Partisipasi Masyarakat Sebagai *Supporting Agency* sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Kerja sama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan[[17]](#footnote-17).

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka dapat disimpulakan bahwa yang menjadi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat sebagai *Supporting Agency* yaitu pengelolaan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki sekolah, Pengelolaan Sarana dan Prasarana agar tepat guna dan Pengelolaan Anggaran.

1. **Hakikat Peningkatan Mutu Pendidikan**
2. **Pengertian Peningkatan**

Pengertian peningkatan dapat kita ambil dari Kamus bahasa Indonesia (KBI) yang diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya)”[[18]](#footnote-18). Selanjutnya Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah “menaikkan derajat taraf dan sebagainya, mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya, proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya kini telah diadakan di bidang pendidikan”[[19]](#footnote-19).

Sejalan dengan pengertian peningkatan, salah satu pakar yang ternama yaitu Ahmad Dzaujak memberikan pendapatnya tentang pengertian peningkatan yang mengatakan bahwa peningkatan adalah “suatu perubahan atau perkembangan dari jenjang atau babak yang satu menuju jenjang yang lebih tinggi dan lebih maju”[[20]](#footnote-20).

Hari Sudrajat juga mengatakan bahwa peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti “berlapis-lapis dari sesuatu yang tersususun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, dengan demikian peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa”[[21]](#footnote-21).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk membantu bawahannya dalam meningkatkan kapasitas sekolah sehingga dapat lebih maju. sekolah dikatakan meningkat apabila adanya suatu perubahan dalam proses penyelenggaraannya menuju perubahan yang lebih baik.

1. **Pengertian Mutu Pendidikan**

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagi suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajad (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya)”[[22]](#footnote-22). Hendarman mengatakan bahwa:

Mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanantekanan ekternal yang berlebihan. Dalam konteks ini, seyogianya institusi pendidikan atau pihak-pihak yang terkait dalam bidang pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa yaitu yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pelanggan (*customer*) dengan merujuk kepada visi dan misi pendidikan tertentu[[23]](#footnote-23).

Oemar Hamalik juga memberikan pendapatnya tenteng mutu yang mengatakan bahwa:

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kritria intrisik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni” manusia yang terdidik” sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik” tenaga kerja” yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan hasil tes prestasi belajar[[24]](#footnote-24).

Menurut D.L. Goetsch dan S Davis (dalam Fandy Tciptono dan Anastasia Diana) mendefinisikan “mutu sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”[[25]](#footnote-25).

Menurut E. Mulyasa (dalam Umiarso & Imam Gojali) mengatakan bahwa “peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh”[[26]](#footnote-26).

Pengertian korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Dzaujak yaitu:

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien tehadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standar yang berlaku[[27]](#footnote-27).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan deskripsi beberapa pakar di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

1. **Indikator Peningkatan Mutu Pendidikan**

Tinjauan mengenai indikator mutu pendidikan tidak terlepas dari pandangan yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu sistem dari sistem kemasyarakatan. Karena lembaga pendidikan merupakan suatu sistem maka akan diperoleh beberapa komponen sistem yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan.Nurhasan mengatakan bahwa Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mutu pendidikan yaitu:

1. Hasil akhir pendidikan
2. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
3. Proses pendidikan
4. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)
5. *Raw input* dan lingkungan[[28]](#footnote-28)

Babari dan Onny S. mengatakan bahwa suatu pendidikan dikatakan bermutu jika mempunyai salah satu atau lebih dari ciri-ciri berikut ini

1. Peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning* *tasks*) yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal).
2. Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya “mengetahui” sesuatu melainkan “dapat melakukan sesuatu” yang fungsional untuk kehidupannya (*learning and earning*).
3. Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Dari segi ini maka relevansi merupakan salah satu aspek atau indikator dari kualitas[[29]](#footnote-29).

Mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil akhir pendidikan. yang menjadi ukuran biasanya tingkah laku para lulusan suatu lembaga pendidikan setelah mereka terjun ke masyarakat atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dilihat dari hasil langsung pendidikan berupa pengetahuan, sikap dan keterampilannya, setelah mereka menyelesaikan suatu pendidikan. Dari proses pendidikan sangat menentukan hasil langsung maupun hasil akhir pendidikan. Sedangkan dilihat dari unsur-unsur instrumen input baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena instrumen input merupakan syarat utama terjadinya proses pendidikan.

M.N. Nasution mendefinisikan delapan dimensi  yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik peningkatan mutu pendidikan. Kedelapan dimensi tersebut yaitu:

1. Kinerja *(Performance)*. Yaitu berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk yakni karakteristik pokok dari produk inti.
2. *Features*. Yaitu Merupakan aspek kedua dari performance yang menambah fungsi dasar serta berkaitan dengan pilihan – pilihan dan pengembangannya , yaitu ciri – ciri tambahan atau karakteristik perlengkapan.
3. Kendala (Reability). Yaitu berkaitan dengan kemungkinan suatu produk yang berfungsi secara berhasil daam periode waktu waktu tertentu dibawah kondisi tertentu. Dengan demikian, kendala merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk.
4. *Conformance*. Yaitu berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
5. Daya Tahan *(Durability)*. Yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.
6. *Serviceability*. Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan.
7. Estetika. Yaitu: merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individul.
8. Kualitas yang dipresepsikan *(perceived quality)*. Yaitu karakteristik yang berkaitan dengan reputasi *(brandname, image)*[[30]](#footnote-30).

Yayah Aliyah juga memberikan pendapatnya yang mengatakan bahwa Indikator mutu pendidikan dapat dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu:

1. Profesionalisme Guru.
2. Kurikulum Dan Proses Pembelajaran.
3. Sarana Prasarana Dan Sumber Belajar.
4. Penilaian Belajar Dan Pembelajaran.[[31]](#footnote-31).

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, Seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi indikator peningkatan mutu pendidikan yaitu profesionalisme guru, kurikulum dan proses pembelajaran, sarana prasarana dan sumber belajar, penilaian belajar dan pembelajaran, dan daya tarik dan keberhasilan belajar peserta didik.

1. **Langkah-Langkah Peningkatan Mutu Pendidikan**

Berkaitan dengan mutu pendidikan saat ini, Suyanto dan M.S. Abbas mengatakan bahwa setidaknya disekolah ada “empat hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian dari para pelaku pembangunan pendidikan yaitu 1) visi, misi dan tujuan pendidikan. 2) jabaran peningkatan mutu pendidikan. 3) cakupan. 4) sumberdaya pendukung atau penghambatnya”[[32]](#footnote-32).

M.N. Nasution mengatakan bahwa langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan yaitu:

1. Merekrut Sumber Daya Manusia yang professional baik untuk tenaga edukatif maupun administratif.
2. Mampu merefleksikan keberhasilan dengan memiliki keistemewaan tersendiri dan telah diakui kehandalannya dan tidak diragukan lagi.
3. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan dalam hal ini murid, wali murid, dan masyarakat setempat, bahwasanya lembaga tersebut telah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan.
4. Mempunyai daya tahan dalam arti berjuang untuk tetap bersaing dalam keadaan bagaimanapun.
5. Mampu melayani semua pihak dengan baik, berperilaku sopan dan berkompetensi serta mampu menangani masalah dengan memuaskan.
6. Menjaga nama baik lembaga dan mengharumkan citra lembaga pendidikan[[33]](#footnote-33).

Dalam meningkatkan mutu pendidikan tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan, adapun langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan menurut Eti Rochaeti dkk yaitu:

1. Memperkuat kurikulum
2. Memeperkuat kapasitas manajemen sekolah
3. Memperkuat sumber daya tenaga kependidikan
4. Perbaikan yang berkesinambungan
5. Manajemen berdasarkan fakta[[34]](#footnote-34)

Selain pendapat di atas, Indra Djati Sidi juga menyebutkan bahwa ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu:

1. Pembenahan kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal.
2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
4. Pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah.
5. Penciptaan iklim dan suasana kompetitif dan koperatif antar sekolah[[35]](#footnote-35).

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan pernah ada habisnya. Keseriusan pengelola pendidikan juga berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Membuat sekolah menjadi bermutu memanglah mudah tapi juga sulit. Dikatakan mudah apabila yang terjun di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar siap untuk mewujudkan harapannya, di dalamnya hanya ada orang-orang yang berpotensi untuk memajukan sekolah dan menciptakan sekolah yag efektif, dengan dimulai dari merekrut para pendidik yang mempunyai Sumber Daya Manusia yang berpotensi tinggi dan professional.

Dikatakan susah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu apabila di dalamnya hanya terdapat orang-orang yang egois, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Jika semua perangkatnya begitu lantas bagaimana akan berjalan yang namanya kerja sama. Maka dari itu untuk mewujudkan mutu pendidikan adalah dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu pendidik.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu meningkatkan sumber daya yang dimiliki sekolah, meningkatkan kapasitas sekolah, memperkuat kurikulum dan tenaga pendidikan, melakukan evaluasi untuk perbaikan yang berkesinambungan dan mampu melayani semua pihak yang terkait dalam pendidikan.

1. **Hipotesis penelitian**

Hipotesis adalah “sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian”[[36]](#footnote-36).

Dengan mengacu kepada pendapat M. Burhan Bungin di atas, maka, dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana.

1. **Penelitian Relevan**

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Asep Mansur dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Annur Azzubaidi Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe”. Dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan ditemukan nilai harga b dan harga a, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y=-38,225 + 1,3376 X. Dengan besarnya X=65, akan diperoleh Y sebesar 86,994, hal ini menunjukkan bahwa bila manajemen berbasis sekolah ditingkatkan, maka peningkatan mutu pendidikan akan meningkat pula. Kemudian berdasarkan perhitungan koefesien determinan (KD) maka diketahui pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan sebesar 38,44%, dan 61,56% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitiannya.
2. Wahyudi Hari Santoso dalam skripsinya yang berjudul pengaruh partisipasi komite sekolah terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di SDN Wilayah Kecamatan Regol Kota Bandung. Dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa pengaruh partisipasi komite sekolah di SDN Wilayah Kecamatan Regol Kota Bandung termasuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata sebesar 3,77 dan peningkatan mutu pendidikan termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor rata-rata sebesar 4,03. Data berdistribusi normal dan hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komite sekolah dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari analisis korelasi yang diperoleh melalui perhitungan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y sebesar 0,50 yang berada pada klasifikasi cukup kuat, sedangkan koefisien determinasinya sebesar 25% sementara sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana Y atas X diperoleh persamaan regresi *Y*ˆ= 27,30 + 0,44*X* . Hal ini berarti untuk setiap perubahan variabel komite sekolah sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh perubahan peningkatan mutu pendidikan sebesar 0,09 satuan.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek tertentu yang memiliki kesamaan dengan skripsi penelitian ini yaitu terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang pengaruh partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti dalam skripsi penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat.

1. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 854. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto*, Sosiologi Suatu Pengantar,* (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada*,* 2006), h. 269. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sardiman, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2001), h. 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.,* h. 54. [↑](#footnote-ref-4)
5. Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi.* (Jakarta: UI Press. 2009), h. 115-118. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, h. 270. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sardiman, *Op. Cit.*, h. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, h. 272. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soleman B. Taneko. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. (Jakarta: Rajawali. 2000), h. 11. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, h. 273. [↑](#footnote-ref-10)
11. Djuretnaa Imam Muhni. *Moral dan Religi.* (Yogyakarta: Kanisius. 2008), h. 29-31. [↑](#footnote-ref-11)
12. KEPMENDIKNAS SK No. 044/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 122. [http:// kepmendiknas.pendidikan.net/komitesekolah.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah.html). (23 Maret 2015). [↑](#footnote-ref-12)
13. Dede Rosyada, *(Paradigma Pendidikan Demokratis) Sebuah Model Pelibatan Masyarkata Dalam Penyelenggaraan Pendidikan,* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 31. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 67. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 114. [↑](#footnote-ref-15)
16. **Dasim Budimansyah, *Indikator Kinerja Komite Sekolah,* (Jakarta: Tim Pengembangan** **Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2007), h. 32.** [↑](#footnote-ref-16)
17. Umaedi, *(Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah) Madrasah Mengelola Pendidikan dalam Era Masyarkat Berubah,* (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004), h. 406-407. [↑](#footnote-ref-17)
18. Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 89. [↑](#footnote-ref-18)
19. Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern Press, 2003), h. 160. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Dzaujak, *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah* *Dasar*, (Jakarta: Depdikbud, 2003), h. 89. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,* (Bandung: CV Cipta Cekas Grafika, 2005), h. 34. [↑](#footnote-ref-21)
22. Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 677. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hendarman, *(Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan) Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan,* (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012 ), h. 38. [↑](#footnote-ref-23)
24. Oemar hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, (Cet. 3; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004) h. 33. [↑](#footnote-ref-24)
25. Fandy Tjiptono, dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi. 2009), h. 4. [↑](#footnote-ref-25)
26. Umiarso & Imam Gojali. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan “Menjual Mutu Pendidikan dengan Pendekatan Quality Control bagi Pelaku Lembaga Pendidikan*”. (Cet. 1; Jogjakarta: Ircisod. 2010), h. 27. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ahmad Dzaujak, *Op. Cit.*, h. 90. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Ffaktor yang Mempengaruhi mutu Pendidikan,* (Jakarta, PT. Sindo, 2008) h. 390. [↑](#footnote-ref-28)
29. Babari dan Onny S. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi,* (Jakarta : CSIS, 2005), h. 87. [↑](#footnote-ref-29)
30. M.N. Nasution, *Management Mutu Terpadu (Total Quality Management*). (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. 2, 2005), h. 112. [↑](#footnote-ref-30)
31. Yayah Aliyah, *Manajemen Mutu Pendidikan Dan Indikator Mutu Pendidikan,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 157. [↑](#footnote-ref-31)
32. Suyanto dan M.S. Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa,* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001), h. 106. [↑](#footnote-ref-32)
33. M.N. Nasution, *Op. Cit.*, h. 114. [↑](#footnote-ref-33)
34. Eti Rochaeti, Dkk, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Bumi Aksara, 2010), h. 23. [↑](#footnote-ref-34)
35. Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 74-75. [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kwantitatif*,(Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 75. [↑](#footnote-ref-36)